

# OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH DI DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Syafril Basri

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau  
Kampus Binawidya Km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

## PENDAHULUAN

*Pemerintah daerah saat ini diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antar-daerah dan mendorong timbulnya inovasi.*

*Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Suatu daerah dikatakan otonom, apabila PAD yang disumbangkan sekitar 30%. Kondisi yang terjadi di Kota Pekanbaru, Pendapatan Asli Daerah belum optimal di dalam memberikan kontribusi kepada APBD.*

Sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah jumlahnya relatif memadai. Meskipun demikian, daerah harus tetap lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung belum optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota selain dengan mengembangkan mekanisme revolving yang melekat pada lain-lain pendapatan dari PAD juga pada komponen PAD yang lain yang dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain di luar institusi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lain. Upaya tersebut sejalan dengan “*Model Intergovernmental Relations*”, dalam rangka otonomi daerah pungen-

pungutan baru dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan daerah lain agar pungutan yang telah ada dapat dioptimalkan. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, pemerintah dapat memperluas dan mengatur pertumbuhan atau perkembangan daerahnya dari tradisional ke arah yang lebih metropolis.

Namun demikian, penggalan sumber penerimaan baru diharapkan tidak menimbulkan terjadinya distorsi kegiatan ekonomi di daerah, misalnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga menimbulkan keengganan investor baru masuk dalam bisnis di daerah. Di samping itu, kebijakan pemerintah daerah tentang pajak/retribusi daerah tidak menimbulkan kelesuan iklim berusaha di kalangan pengusaha daerah.

Dalam kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh suatu Daerah Otonomi, limpahan kewenangan yang cukup luas perlu dikelola dengan cermat sehingga kewenangan tersebut mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dengan baik. Namun perlu dijelaskan di sini bahwa “tidak selalu kewenangan yang dimiliki bernuansa pemungutan akan tetapi banyak kewenangan bernuansa pelayanan sehingga perludisadari bahwa kewenangan yang luas tentunya akan diikuti dengan semangat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.

Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah atau retribusi daerah, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

## **RINGKASAN BEBERAPA PENERIMAAN DAERAH DAN BAGI HASIL**

Penerimaan Pemerintah Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan yang sangat cepat. Tahun 1994, penerimaan pemerintah di dalam APBN hanya sebesar sebesar 35,8 milyar rupiah sedangkan di tahun 2006 telah mencapai satu triliun rupiah lebih. Rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 25,95%, di mana pertumbuhan paling rendah di tahun 1997 yaitu sekitar – 11,15% karena realisasi yang kecil diakibatkan adanya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi.

**Tabel 1 : Realisasi Penerimaan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 1994 – 2006**

**(Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Daerah</b>	<b>Pert. (0/6)</b>
1994	35,805,260,000.00	-
1995	41,731,500,000.00	16.55
1996	50,409,540,000.00	20.79
1997	44,789,430,000.00	-11.15
1998	66,756,807,993.00	49.05
1999	77,768,090,000.00	16.49
2000	123,749,800,000.00	59.13

2001	346,226,974,774.00	179.78
2002	440,773,048,462.24	27.31
2003	519,204,007,684.00	17.79
2004	644,257,810,302.00	24.09
2005	846,071,921,527.00	31.33
2006	1,141,718,571,254.00	34.94

**Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru,**

Sumber penerimaan Pemerintah Kota Pekanbaru berasal dari pendapatan asli daerah dan juga transfer dari pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi. Tahun 2001 dimulainya implementasi otonomi daerah secara luas, dan juga perubahan di dalam perimbangan keuangan sehingga penerimaan. Pemerintah Kota Pekanbaru tumbuh mencapai 179,78% dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan pemerintah cenderung mengikuti trend ekonomi secara luas, karena adanya hubungan langsung dengan pajak ataupun dana transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, seperti DAU atau DAK.

Pendapaatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang sangat pesat selama periode kajian. Tahun 1994 jumlah realisasi PAD hanya mencapai Rp. 5,8 milyar dengan pertumbuhan yang mengesankan hingga tahun 1997 menjadi sekitar Rp. 12,5 milyar. Namun akibat krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi, terjadi penurunan realisasi menjadi hanya Rp. 9,4 milyar.

**Tabel 2 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 1994 – 2006 (Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Pert. (%)</b>
1994	5,830,970,000.0	-
1995	7,235,910,000.0	24.09
1996	8,561,630,000.0	18.32
1997	12,570,888,188.00	46.83
1998	9,411,869,756.3	-25.13
1999	12,794,930,000.	35.94
2000	15,572,350,000.	21.71
2001	37,615,518,829.	141.55
2002	48,294,830,000.	28.39
2003	58,701,848,900.	21.55
2004	71,907,180,535.	22.50
2005	86,945,155,571.	20.91
2006	104,449,429,314	20.13

**Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, 2007 (berbagai tahun terbitan)**

Sejak tahun 1999 realisasi penerimaan terus mengalami peningkatan dan jumlahnya di atas Rp. 10 milyar. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2001, yaitu tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Banyak potensi penerimaan yang dapat digali sehingga terjadi kenaikan yang drastis, dan di tahun-tahun berikutnya terus mengalami kenaikan rata-rata lebih dari 20% per tahunnya.

Perkembangan pajak daerah di dalam PAD sejak tahun 1994 hingga 2006 telah meningkat dari Rp. 2.232 juta, menjadi Rp. 49.901. Perkembangan ini tidak terlepas dari kemajuan ekonomi yang

dicapai Kota Pekanbaru. Selain jumlahnya semakin besar, sumbangannya terhadap pembentukan PAD juga semakin meningkat, dari hanya 38,28% di tahun 1994 menjadi 47,78% di tahun 2006. Hal tersebut membuktikan bahwa kemandirian keuangan pemerintah Kota Pekanbaru semakin membaik, walaupun berfluktuasi dengan pencapaian tertinggi pada tahun 1999 mencapai 61,75%.

**Tabel 3 : Realisasi Penerimaan Dari Pajak Daerah Di Dalam PAD Kota Pekanbaru Tahun 1994 - 2006 (Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Share (%)</b>	<b>Growth(%)</b>
1994	2.231.980.000	38,28	-
1995	2.445.730.000	33,80	9,58
1996	3.229.040.000	37,72	32,03
1997	3.940.110.000	31,48	22,02
1998	4.389.625.455	46,64	11,41
1999	7.900.610.000	61,75	79,98
2000	8.166.400.000	52,44	3,36
2001	17.296.660.141	45,98	111,80
2002	22.727.379.000	47,06	31,40
2003	30.153.079.000	51,37	32,67
2004	38.215.443.000	53,15	26,74
2005	46.745.678.000	53,76	22,32
2006	49.901.091.156	47,78	6,75

**Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, 2007 (berbagai tahun terbitan)**

Pajak daerah terbesar adalah dari pajak hotel restoran, reklame dan penerangan jalan. Penerimaan dari PPJ dilaksanakan bekerjasama dengan pihak PLN, tetapi identifikasi potensi yang telah dilakukan masih belum optimal dengan kondisi yang ada di masyarakat sehingga sulit untuk mencapai target yang ditetapkan. Demikian pula pajak reklame, estimasi yang dibuat masih relatif rendah (*under estimate*) dibandingkan dengan pertumbuhan sektor reklame sehingga selalu cenderung memenuhi target. Sama halnya dengan penetapan target di sektor pajak restoran.

Penerimaan dari retribusi pengelolaan KTP/Simduk ini tidak lagi dapat dijadikan andalan karena di dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, biaya retribusi KTP akan dikurangi atau bahkan dihapuskan seperti di beberapa daerah lain. Dengan demikian target atau pun capaiannya tidaklah terlalu signifikan di dalam mempertimbangkan strategi optimalisasi penerimaan.

Penerimaan dari bagi hasil provinsi yang paling besar adalah dari PKB-PPNKB dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, namun kedua sektor ini capaiannya masih di bawah target. Hal ini disebabkan

masuknya penerimaan dari sektor bagi hasil ini tergantung dari pihak pengumpul pajak, dalam hal ini pemerintah provinsi, sehingga target yang dibuat sulit untuk dicapai sebelum akhir tahun anggaran.

## **FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA PENERIMAAN DAERAH**

Belum optimalnya penerimaan daerah Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;
2. Perangkat hukum dan law enforcement yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan.
3. Belum lengkapnya data base tentang pajak dan retribusi daerah.
4. Relatif rendah dan kurang berkembangnya basis, struktur serta jenis pajak dan retribusi daerah.  
Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan. Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
5. Perannya yang relatif kecil dalam total penerimaan daerah  
Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan. PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan. “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
6. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah  
Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
7. Kurangnya koordinasi internal dan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
8. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Optimalisasi sumber-sumber penerimaan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial (kurang koordinasi), sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak

konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

## **UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH**

Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah hanya semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan. Upaya ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan ekonomi nasional. Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah yang ada. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sahih potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan berdasar pada asas manfaat dan asas keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut berbagai sumber daya (*software dan hardware*) yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan. (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Dalam jangka pendek upaya peningkatan penerimaan daerah hanya mampu meletakkan dasar-dasar yang mengarah pada penerimaan daerah yang “benar” dan mencerminkan fungsi pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah yang tidak terarah dan benar (hanya bersifat jangka pendek dan untuk kepentingan kelompok tertentu) justru akan menjatuhkan kewibawaan pemerintah dan DPRD di mata publik yang pada gilirannya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu penentuan potensi (penyusunan basis data potensi) setiap jenis penerimaan daerah secara benar dan penerapan sistem dan prosedur koleksi penerimaan daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah setempat serta pengawasan yang benar-benar oleh DPRD akan mampu mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi.

3. Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah  
Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui
  - a. Menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif,
  - b. Penerimaan tenaga pengelola.
  - c. Pelatihan tenaga pengelola
  - d. Penetapan kinerja tenaga pengelola
  - e. Pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (gaji, upah pungut, karir dan sistem pensiun).
4. Meningkatkan pengawasan  
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain.
  - a. Pengawasan terencana.
  - b. Inspeksi mendadak.
  - c. Konsistensi penerapan sanksi.
5. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan  
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
6. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik  
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
7. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi  
Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah
  - a. Melalui pendekatan persuasif-partisipatif,
  - b. Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi,
  - c. Pelaksanaan pelayanan prima.
8. Memetakan potensi penerimaan

Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan sumber penerimaan yang berasal dari pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta kontribusinya terhadap keuangan dan perekonomian daerah. Upaya ini dilakukan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan cara menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah penerimaan daerah yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen penerimaan daerah, seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal.
2. Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaan pajak dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian daerah yang bersangkutan. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah yang bersangkutan.
3. Kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat tepat saat ini untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek sebaiknya dititikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak yaitu mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah di masa mendatang seyogyanya dilakukan melalui peningkatan taxing power dan sharing tax.
4. Penggalan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu: dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Kondisi ini tergantung oleh respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi.

Perlu dilakukan identifikasi spesifik terhadap faktor penyebab belum optimalnya penerimaan daerah sehingga dapat dilakukan upaya optimalisasi penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.